

Received: November 2021

Accepted: Desember 2021

Published: Januari 2022

Article DOI: <http://dx.doi.org/10.24903/sj.v6i1.1157>

Penyuluhan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa Kampung Sambakungan di Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau

*Yesi Aprianti**Universitas Mulawarman Samarinda*yesi.aprianti@feb.unmul.ac.id*Singka Hana Berlyn**Universitas Mulawarman Samarinda*singkaberlyn99@gmail.com*Upi Fathimah Az Zahra**Universitas Mulawarman Samarinda*upizahra31@gmail.com

Abstrak

Penyelenggara pemerintahan tepatnya pada Kantor Kepala Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau diharapkan memiliki kemampuan bekerja berdasarkan pencapaian prestasi maupun tingkat produktivitas tinggi untuk mewujudkan RPJM Desa. Namun pada kenyataannya aparatur desa di Desa Kampung Sambakungan masih sulit memahami proses perencanaan dan implementasi rencana kerja pemerintah (RKP) Desa. Solusi mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang sistem pemerintahan desa dan penyusunan APBDesa berbasis kinerja. Setelah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan aparatur Kampung Sambakungan, kami memberikan penyuluhan kepada aparatur di Kantor Kepala Kampung dengan target meningkatkan pengetahuan bagi aparatur Kampung Sambakungan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam menjalankan pemerintahan desa. Terbentuknya aparatur pemerintah desa di Kampung Sambakungan yang berkualitas, dapat secara mandiri melaksanakan tugas dan kewajiban serta fungsinya pemerintahan sesuai dengan tata pemerintahan yang berlaku dalam pelayanan kepada masyarakat. Aparatur desa dapat membuat kontrak kinerja yang tertuang dalam APBDesa sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan RKP Desa. Selain itu menumbuhkan wawasan pengetahuan SDM aparatur Kampung Sambakungan sehingga menghasilkan cara berpikir, bersikap, bertindak dan pada akhirnya berperan aktif dalam pembangunan pengembangan Kampung Sambakungan. Hal ini juga diharapkan memberikan kontribusi dengan tujuan yang hendak dicapai Desa Tangguh Penyangga IKN.

Kata Kunci: *kampung Sambakungan; penyuluhan sistem pemerintahan; APBDesa berbasis kinerja.*

Pendahuluan

Sumber daya merupakan suatu potensi atau kemampuan yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan fungsi atau operasi organisasi atau lembaga. SDM disebut sebagai pengelola, dimana akan mengambil peran mengatur berbagai sumber daya meraih tujuan organisasi tersebut. (Werther n.d.), menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah perwujudan dari pegawai/karyawan yang secara siap, mampu dan siaga dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemampuan SDM diukur dari kapasitasnya, dimana pernyataan berkualitas tinggi adalah saat sumber daya manusia sebagai pencipta dan bukan hanya terletak pada nilai komparatif, namun juga peningkatan nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan sumber daya dari integritas diri, kreatifitas dan daya imajinasi yang dimiliki. (Ndraha 1999). Menurut (Sugeng and DA Atmoko 2020), kualitas sumber daya dari manusia diukur dengan adanya penguasaan pengetahuan, kemampuan dalam keterampilan dan kemampuan yang dapat digunakan untuk menghasilkan kinerja secara profesional.

Memenuhi prinsip kemampuan SDM tersebut, dapat dilaksanakan dalam pendidikan secara formal maupun tidak. Kegiatan penyuluhan adalah bentuk peningkatan kemampuan secara non formal. Penyuluhan pada prinsipnya adalah kegiatan pendidikan non formal yang bertujuan menjadikan perilaku seseorang dari tidak mengerti tentang sesuatu hal sehingga menjadi paham/mengerti hal tersebut, dari tidak bisa melakukan sesuatu hal/kegiatan sampai terampil melakukannya. Unsur yang harus ada dalam setiap penyuluhan adalah: 1). Penyuluh, bertindak sebagai pemrakarsa dan atau mendorong terjadinya perubahan; 2). Khalayak sasaran penyuluhan, bertindak sebagai pihak yang belajar agar mencapai suatu perubahan; 3). Materi penyuluhan (Dwiyandana 2017). Menurut (Mangkunegara and Agustine 2016) pendidikan merupakan proses penambahan kemampuan untuk mempelajari secara konseptual dan teoritis yang ditunjukkan pada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan.

Peran dan kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan sangat menentukan dalam pencapaian kinerja. Aparatur desa merupakan tulang punggung dalam proses perencanaan sampai pada proses evaluasi pelaksanaan RPJM Desa. Secara aplikatif, aparatur desa tidak bisa lepas dari kendala atas keterbatasan kemampuan pemahaman dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan lingkungan kerja (Matondang 2015). Oleh sebab itu, setiap SDM baik yang bekerja pada sektor pemerintah dan/atau swasta harus dibekali dengan pendidikan untuk dapat menguasai keterampilan kerja yang dibutuhkan. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, yang pada dasarnya diharapkan dapat menciptakan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat persatuan dan kesatuan, dan pengembangan wawasan aparatur (Peraturatn Pemerintah No. 101 2000).

Desa telah menjadi daerah otonomi. Tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal-asal dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten (Undang-undang RI 2004). Meningkatkan peran serta daerah dalam proses pembangunan wilayah, pada tahun 2000 mulai dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2004, Pemerintah mengeluarkan regulasi tentang penyelenggaraan pemerintah pada tingkat daerah kabupaten/kota. Selanjutnya regulasi untuk mendukung kebijakan otonomi daerah terus diperbarui. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil, dapat menunjukkan eksistensinya dengan adanya

UU No.6/2014 tentang desa. Sehingga pada tahun 2015 menjadi momentum kebangkitan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam penerapan regulasi (Undang-Undang RI 2014) tentang desa. Desa diberikan posisi kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang secara integral sebagai kesatuan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan nasional.

Desa memiliki tantangan untuk bagaimana memanfaatkan potensi desa. Potensi desa dapat diklasifikasikan dari sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai sumber daya yang paling dominan untuk mengontrol segala potensi desa. SDM Desa, tidak hanya kapasitas pendidikan penduduk tetapi juga kepemilikan aparatur desa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemerintahan desa. Sumber daya manusia menjadi faktor dominan dalam lembaga, baik badan usaha pemerintah maupun swasta. Setiap pimpinan yang dalam hal ini adalah kepala instansi pemerintahan tepatnya pada Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau mengharapkan SDM berkemampuan kerja yang baik, pemenuhan pencapaian prestasi kerja maupun tingkat produktivitas kerja yang tinggi dari masing-masing aparaturnya.

Uraian tersebut memberikan justifikasi bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur desa pada Kampung Sambakungan (Kabupaten Berau), kami perlu melakukan peluyuhan dengan tema sistem pemerintah desa dan penyusunan APBDesa berbasis kinerja. Hal ini dilakukan karena adanya kinerja aparatur yang belum maksimal dalam mencapai target RPJM Desa. Hal ini bertujuan memberikan pemahaman kepada aparatur desa dalam Menyusun rencana perwujudan RPJMDesa dari system pemerintaha dan didukung anggaran yang sesuai.

Metode

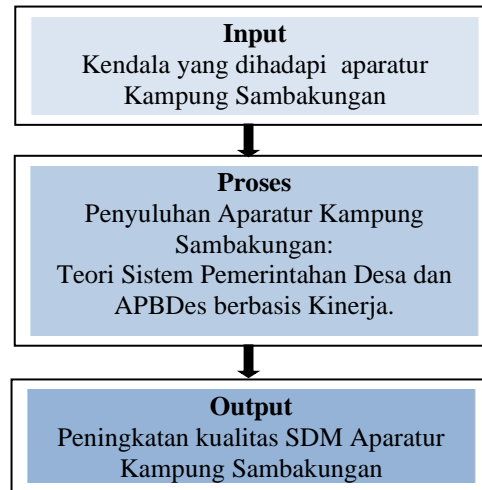
Metode untuk memecahkan permasalahan rendahnya kinerja SDM dalam pencapaian target Desa adalah penyuluhan berdasarkan teori-teori sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan aparatur Kampung Sambakungan, kemudian dilanjutkan dengan analisis situasi di lapangan, identifikasi masalah, menentukan tujuan kerja dan mendapatkan solusi penyelesaian melalui:

1. Penyuluhan Sistem Pemerintahan Desa

Dalam usaha meningkatkan SDM aparatur Kampung Sambakungan sangatlah penting untuk mengetahui lebih mendalam mengenai konsep dari sistem pemerintahan desa, susunan organisasi pemerintahan desa sesuai dengan peraturan, tugas dan fungsi pemerintah desa, hak atau kewajiban desa dan masyarakat desa, serta peranan pemerintah desa sehingga terciptanya taat kelola pemerintahan yang baik.

2. Penyuluhan Penyusunan APBDes

Dalam usaha meningkatkan SDM aparatur Kampung Sambakungan juga penting mengetahui secara mendalam definisi, fungsi dan prinsip APBDes, dasar hukum, pihak yang terlibat di dalam penyusunannya, tahap penyusunan APBDes serta APBDes berbasis kinerja dalam hal perencanaan dan implementasi. sehingga dalam penyelenggaraan sesuai dengan segala aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Pola Penyelesaian Masalah

Kegiatan Penyuluhan dilaksanakan di Kantor Kepala Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, dengan judul “SDM yang Mandiri di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan” pada 12 Agustus 2021 yang pada proses pelaksanaannya menggunakan metode penyuluhan yang dilakukan secara offline. Sebelumnya kami juga melakukan pendampingan aparaturnya desa mulai dari 06 Juli sampai dengan 11 Agustus 2021. Indikator keberhasilan dalam kegiatan ini adalah terbentuknya aparaturnya pemerintah desa di Kampung Sambakungan yang berkualitas dan dapat secara mandiri melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai tata pemerintahan yang berlaku dalam pelayanan kepada masyarakat, serta pemahan aparaturnya desa dalam menyusun APBDesa berbasis kinerja sehingga setiap pelaksanaan tugas perangkat desa dapat berjalan sesuai dengan RKP Desa. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, aparaturnya Kampung Sambakungan dapat meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mencegah atau mengantisipasi persoalan-persoalan yang mungkin muncul kedepannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Kampung Sambakungan. Juga dengan adanya kegiatan ini dapat menunjang pencapaian tujuan pembangunan “Desa Tangguh Penyangga IKN”.

Diskusi

Aparaturnya desa membutuhkan adanya peningkatan pengetahuan untuk menguasai kemampuan dan keterampilan kerja agar tercipta hasil kinerja yang baik sehingga dapat mencapai target RPJMDesa dan melangsungkan pelayanan kepada masyarakat secara profesionalitas. Aparaturnya desa harus memahami tugas dan fungsi pokoknya dengan baik kemudian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dapat tercapai. Pemerintah Desa dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM aparaturnya secara bertahap. Peningkatan kualitas SDM adalah suatu usaha yang bertujuan untuk menciptakan daya tanggap kinerja pemerintah yang efisien dan efektif. Meningkatkan kualitas SDM aparaturnya merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

Terwujudnya SDM aparaturnya yang berkualitas tentunya dibutuhkan aparaturnya yang profesional dari segi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan kualitas SDM aparaturnya kini menjadi

hal yang sangat penting untuk memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Peningkatan kualitas SDM aparatur Kampung Sambakungan diperoleh melalui penyuluhan yang diterima aparatur, yaitu penyuluhan sistem pemerintahan desa dan penyuluhan penyusunan APBDes. Hasil kegiatan penyuluhan yang kami lakukan kepada aparatur Kampung Sambakungan adalah kegiatan penyuluhan kepada aparatur dengan judul “SDM yang Mandiri di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan” dilaksanakan pada hari Kamis 12 Agustus 2021 di Kantor Kepala Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau.

Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta penyuluhan yang berjumlah 9 orang, terdiri dari Kepala dan Sekretaris Kampung Sambakungan, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan staf lainnya. Penyuluhan dilakukan secara offline dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kami memberikan pemaparan materi dan selama pelaksanaan penyuluhan peserta responsif dan aktif mengikuti kegiatan dengan sungguh sungguh memperhatikan materi yang disampaikan penyaji, serta pada saat diskusi apabila terdapat perbedaan materi dengan fakta di lapangan, akan langsung diungkapkan secara langsung kepada penyaji. Peserta penyuluhan menyambut dengan antusias kegiatan penyuluhan.



Gambar 2. Pembukaan dan Sambutan Kegiatan Penyuluhan Aparatur Kampung Sambakungan

Terdapat dua materi kunci yang kami sampaikan. Pertama, materi tentang tata kelola pemerintahan yang baik, (*good governance*) sebagai suatu tanggung jawab dari kewenangan system pemerintahan yang dilaksanakan apatarur daerah pada bidang ekonomi, administrasi dan politik untuk mengatur potensi yang ada untuk kepentingan masyarakat. Pada Desa Sambakungan kami menyampaikan bagaimana desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kordinasi. Pemahaman ini penting dalam mewujudkan Renstra Desa Sambakungan.



Gambar 3. Penyampaian Dan Diskusi Materi Kegiatan Penyuluhan Sistem Pemerintahan Desa & Penyusunan APBDes Kepada Aparatur Kampung Sambakungan

Sistem pemerintahan desa yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi, baik aparatur desa, masyarakat, badan permusyawaratan desa, dan sampai ke pemerintah kabupaten (bupati). Sistem pemerintahan tidak dapat berkolaborasi dengan maksimal jika tidak didukung oleh lembaga masyarakat yang secara aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan program pemerintah. Selanjutnya, untuk pencapaian tujuan desa, Desa Sambakungan harus memiliki dokumen perencanaan program yang dituangkan dalam APBDesa.

Penyusunan APBDesa berbasis kinerja merupakan materi kedua. Permasalahan di Penyusunan APBDes pada Desa Sambakungan kurangnya perencanaan program jangka panjang untuk pembangunan desa. Kami mengadakan penyuluhan penyusunan APBDes berbasis kinerja dengan pendekatan perencanaan jangka panjang terhadap Restra Desa. Penyuluhan dimulai dengan memberikan pemahaman tentang prinsip APBDes, regulasi terkait dan bagaimana penerapannya, peran masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan APBDes, dan APBDes berbasis kinerja.

Perencanaan APBDes dimulai dengan melakukan dengan mengenali potensi desa dan selanjutnya menuntukan program prioritas untuk dijadikan target kinerja desa. Dalam pelaksanaannya, kepala desa/kampung menuangkan rencana tersebut dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dalam satu periode (tahunan). Kepala desa juga perlu melakukan pengukuran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam tahun berjalan, serta evaluasi dengan tujuan pencapaian atas pelaksanaan penyerapan anggaran. Hasil kegiatan memberikan manfaat nyata kepada pemahaman aparatur desa dalam penyusunan APBDes.

Simpulan dan rekomendasi

Kegiatan pengabdian, dirangkaikan dengan penyelenggaraan kegiatan KKN Universitas Mulawarman yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada aparatur di Kantor Kepala Kampung Sambakungan Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau dengan target meningkatkan pengetahuan bagi aparatur Kampung Sambakungan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam menjalankan pemerintahan desa. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Kampung dimulai dengan memberikan pemahaman tentang sistem tata pemerintahan desa dan penyusunan APBDesa berbasis kinerja. Terbentuknya aparatur pemerintah desa di Kampung Sambakungan yang berkualitas, dapat secara mandiri melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik

sesuai tata pemerintahan yang berlaku dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu menumbuhkan wawasan pengetahuan SDM aparatur Kampung Sambakungan sehingga menghasilkan cara berpikir, bersikap, bertindak dan pada akhirnya berperan aktif dalam pembangunan pengembangan Kampung Sambakungan. Hal ini juga diharapkan memberikan kontribusi dengan tujuan yang hendak dicapai Desa Tangguh Penyangga IKN. Kami merekomendasikan agar kegiatan peningkatan terhadap penyelenggara pemerintahan desa terus dilaksanakan terutama untuk mengoptimalkan potensi yang ada di desa. Desa dapat melaksanakan studi banding ke desa-desa maju.

Daftar Pustaka

- Dwiyandana, Dani. 2017. "Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Desa Cibaliung Melalui KUM-ITT Universitas Trisakti Di Pandeglang Banten." *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 2(1):1–12.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, and Rela Agustine. 2016. "Effect of Training, Motivation and Work Environment on Physicians' Performance." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 5(1):173.
- Matondang, Armansyah. 2015. "Pembinaan Aparatur Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Tugas Di Bagian Umum Sekretariat Kantor Bupati." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 3(2):160–74.
- Ndraha, Taliziduhu. 1999. "Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia." *Rineka Cipta, Jakarta*.
- Peraturan Pemerintah No. 1. 2000. "Tentang Diklat Jabatan Aparatur Sipil Negara."
- Peraturatn Pemerintah No. 101. 2000. "Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara,."
- Sugeng, S. S., and Dwi DA Atmoko. 2020. "Strategi Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Hukum Melalui Skema Sertifikasi Profesi."
- Undang-undang RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang RI. 2014. *No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Werther, William. n.d. "B. Jr., Dan Keith Davis.(1996)." *Human Resources and Personnel Management. New York: McGraw-Hill Publication, Inc.*